



**PUTUSAN**

Nomor 1592 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOGAR SIMANUNGKALIT alias KALIT;**  
Tempat Lahir : Adiankoting;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/16 Mei 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bandara Pinangsori, Desa Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOGAR SIMANUNGKALIT alias KALIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
  3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
    - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan seberat 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram *netto*;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Trawberry warna biru dengan nomor SIM 085261908265;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 25 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOGAR SIMANUNGKALIT alias KALIT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOGAR SIMANUNGKALIT alias KALIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid.Sus/2024



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan seberat 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram *netto*;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Trawberry warna biru dengan nomor SIM *card* 085261908265;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1579/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 21 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa TOGAR SIMANUNGKALIT alias KALIT tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 25 September 2023 atas nama TOGAR SIMANUNGKALIT alias KALIT, yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Pid/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum karena berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*);
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni didasarkan pada fakta hukum bahwa polisi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat *netto* 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram, yang disimpan Terdakwa di tempat tidur dalam kamar dan lemari dalam dapur rumah Terdakwa dan Saksi Kamelia Bakkara (istri Terdakwa) di Jalan Bandara Pinangsori, Desa Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian, *judex juris* menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki oleh karena kurang mempertimbangkan sejumlah putusan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti relatif sama, serta kurang memperhatikan aspek keadilan serta dapat menimbulkan disparitas pemidanaan. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1579/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 21 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 113/Pid.Sus/

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Sbg tanggal 25 September 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TOGAR SIMANUNGKALIT alias KALIT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1579/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 21 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 25 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

TTD

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP 196110101986122001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)